

## PERAN AUSTRALIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK INDONESIA DAN BELANDA MELALUI PERUNDINGAN RENVILLE

Oleh: R. Sarjono<sup>4</sup>

### Pendahuluan

Hingga tahun 1975 di kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara Vietnam Selatan, Laos dan Kamboja terjadi perang yang sangat hebat, yakni peperangan antara kelompok negara komunis melawan negara non-komunis yang berakhir pada jatuhnya negara-negara non-komunis. Melihat fenomena yang demikian, Australia sebagai salah satu negara yang sangat anti komunis merasa resah. Untuk membendung menjalarnya paham komunis dan mempertahankan eksistensinya, Australia merasa perlu menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga terdekat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Jalinan yang erat antara Indonesia dengan Australia sebenarnya tidak saja terjadi pada saat-saat terakhir meletusnya perang Indocina yang berakhir dengan jatuhnya negara-negara non-komunis ke tangan komunis. Hubungan akrab antara kedua negara sudah terjalin sejak masa perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dari agresi Belanda I. Konflik antara Indonesia dan Belanda itu diakhiri dengan perjanjian Renville. Tulisan ini ingin mengetengahkan peran Australia dalam menghantarkan kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik ke meja perundingan Renville.

Karya tulis ini disusun berdasarkan studi literatur. Data yang telah berhasil

dikumpulkan dari berbagai literatur yang ada kemudian dianalisis untuk diteliti kebenarannya, dikomparasikan, diseleksi, dikelompokkan menurut permasalahannya dan akhirnya disintesis.

### Pembahasan

Sejak lahirnya negara Australia pada tanggal 1 Januari 1901, bangsa Australia telah menunjukkan eksistensinya sebagai sebagai suatu bangsa yang mempunyai identitas dan mandiri diantara bangsa-bangsa lain di dunia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soebantardjo (1964: 230) bahwa Australia berusaha untuk tidak menyadarkan diri pada negara Inggris. Sebelum Perang Dunia I, Australia memang sangat bergantung kepada Inggris. Namun sesudah itu bangsa Australia berusaha untuk membangun angkatan perang tersendiri. Hal ini terbukti pada tahun 1939 Australia telah memiliki 500.000 personil militer dan 5000 pesawat terbang dalam berbagai macam.

Setelah Perang Dunia II kiblat pandangan Australia tidak lagi diarahkan kepada Inggris, tetapi dipindahkan ke Amerika. Satu faktor penting yang mengubah kiblat pandangan Australia ini adalah ketakutannya kepada Jepang (Sunardi, 1985: 81).

Australia bukan saja menjadi salah satu negara yang kuat pada bidang militer. Dari segi ekonomi, Australia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber-

<sup>4</sup> R. Sarjono adalah Guru SD di Wilayah Ranting Dinas P dan K Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta

sumber alam. Dengan kekayaan alam yang cukup itu menyebabkan Australia mampu menjamin kemakmurannya (Kantor Penerangan Australia, 1980: 23). Dari masa Perang Dunia II sampai awal tahun 1970 an pendapatan perkapita telah meningkat dan angka rata-rata pengangguran telah menurun.

Sekalipun di atas sudah dinyatakan bahwa Australia selalu berusaha menjadi bangsa yang mandiri, namun ketergantungannya pada negara Inggris masih lekat. Hal ini dapat dimengerti mengingat sebagian besar warga Australia adalah imigran dari Inggris yang menganggap ratu Inggris sebagai pemersatu. Keeratan hubungan antara Australia dan Inggris ini nampak dengan ditunjuknya wakil Mahkota Kerajaan Inggris di Australia (Kolit, 1976: 46).

Satu hal pokok yang mendasari kebijakan hubungan luar negeri Australia adalah bahwa negara tersebut termasuk suatu kekuatan tingkat menengah. Australia berada pada suatu kawasan negara-negara Pasifik Selatan yang baru saja merdeka. Negara-negara tersebut bukan saja penting dari segi ekonomi, tetapi juga penting dari segi politik. Kesadaran akan pentingnya negara-negara tersebut telah menggerakkan Australia untuk menjalin kerja sama. Adanya kerja sama dengan negara-negara tetangga akan menimbulkan stabilitas, perkembangan perdagangan dan teknologi. Bentuk hubungan yang demikian juga dijalin dengan negara-negara Asia Tenggara.

Kebijaksanaan pertahanan Australia diarahkan untuk mempertahankan dan mengembangkan lingkungan strategis regional yang baik. Oleh karena itu ketika di kawasan Asia Tenggara dibentuk kerja sama Regional yang bernama ASEAN, Australia mendukung bentuk kerja sama tersebut. Demi terwujudnya tujuan tersebut, Australia memperbesar anggaran

belanjanya pada bidang pertahanan. Sebagai salah satu contoh dari upaya tersebut adalah didirikannya Organisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan dalam lingkungan departemen pertahanan yang merupakan organisasi pengembangan dan riset terbesar di kedua di Australia.

Australia menganggap bahwa salah satu ujian terbesar dalam politik luar negeri Australia adalah masalah-masalah yang mempunyai dimensi dunia yang sedang dihadapi masyarakat internasional, termasuk yang terjadi di Asia Tenggara. Hal tersebut meliputi krisis pangan, energi, ledakan penduduk jurang yang semakin besar antara negara kaya dan miskin dan semakin berkembangnya persenjataan nuklir. Dalam masalah-masalah tersebut negara Australia berkepentingan untuk membebaskan Asia Tenggara dari pengaruh komunis, khususnya dari konflik Vietnam. Hubungan antara Australia dan Asia Tenggara sesudah Perang Dunia II sampai tahun 1975-an sangat dirasakan, terutama terhadap Indonesia dalam masa perang Indocina.

Hubungan tradisional antara Australia dan Indonesia sebenarnya sudah terjalin lama. Seusai Agresi Belanda I Australia sangat memperhatikan peringatan Inggris tentang rencana membawa perselisihan Indonesia ke PBB. Pada tanggal 21 Juli 1947 Australia langsung memberi tahu Indonesia untuk mengajukan banding ke Skjen PBB (George, 1986: 126). Menanggapi himbauan dari Australia tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil sikap cepat dan tepat sehingga pada tanggal 22 Juli 1947 Sjarifuddin secara terbuka mengundang menteri luar negeri Australia, Evatt untuk ikut campur tangan dalam menangani masalah agresi Belanda terhadap Indonesia tersebut. Sebagai tindak lanjut dari permintaan Indonesia akan campur tangan Australia terhadap

penyelesaian Agresi Belanda I ini, Evatt berencana membawa permasalahan tersebut ke Dewan Keamanan PBB. Tindakan Evatt ini didukung oleh Perdana Menteri Australia pada waktu itu Chifley (Soemarto Djodjohardjo dan Abdul Hamid, 1952: 116).

Ketika masalah Indonesia diterima masuk dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada tanggal 30 Juli 1947, Australia menyerahkan rancangan resolusi yang menyerukan agar semua pihak menghentikan berbagai tindak kekerasan dan menyerahkan masalah persengkataannya kepada arbitrase. Akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB memerintahkan kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak. Pada tanggal 4 Agustus 1947 pemerintah Indonesia dan Belanda mengumumkan berhentinya tembak-menembak. Dengan pengumuman tersebut berakhirlah Agresi Belanda I.

Perjuangan Australia untuk membela kepentingan Indonesia masih tetap berlangsung. Untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda, Australia ikut bergabung dalam Komisi Konsuler yang beranggotakan konsul-konsul jenderal dari Amerika, Cina, Inggris, Belgia dan Perancis. Komisi Konsuler ini diketuai oleh Konsul Jenderal dari Amerika, Walter Foote.

Perjuangan Australia membela kepentingan Indonesia berlangsung di dalam lingkup maupun di luar Dewan Keamanan PBB. Di dalam Dewan Keamanan PBB Australia terus memperjuangkan kepentingan-kepentingan Republik Indonesia. Hal ini ditengarai dengan diterima usulan Australia oleh Dewan Keamanan PBB bahwa Indonesia diperbolehkan mengikuti perdebatan-perdebatan di Dewan Keamanan yang membahas masalah Indonesia. Sementara itu di luar

Dewan Keamanan, Australia terus berusaha mendesak Belanda agar menerima arbitrase multilateral. Pada tanggal 22 Agustus 1947 Australia juga mengajukan satu rancangan resolusi yang mengusulkan agar Dewan Keamanan meminta Belanda Dan Indonesia untuk menerima komisi arbitrase tiga pihak yang terdiri dari atas satu pilihan Belanda, satu pilihan Indonesia dan satu lagi dipilih oleh Dewan Keamanan PBB. Namun usulan ini ditolak oleh Dewan Keamanan dan selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1947 Desan menerima rancangan yang diajukan oleh Amerika Serikat yang berisi tawaran "jasa baik" kepada kedua belah pihak. Isi tawaran adalah jika diminta untuk membantu menyelesaikan pertikaian akan dibentuk suatu komisi yang beranggotakan tiga anggota Dewan. Dua diantaranya dipilih oleh masing-masing pihak, sedangkan anggota yang ketiga ditentukan oleh dua anggota yang telah terpilih.

Untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan mencari penyelesaian secara damai atas konflik antara Indonesia dan Belanda maka Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah Komisi Jasa Baik yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara. Atas jasa baik Australia terhadap Indonesia dalam pencaturan politik internasional tersebut maka Kabinet Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 10 September 1947 meminta Australia untuk menjadi anggota Komisi Tiga Negara. Sementara itu Belanda memilih Belgia, dan kemudian Belgia menerima Pencalonan itu pada tanggal 10 September 1947. selanjutnya Australia dan Belgia memilih Amerika Serikat sebagai penengah atau pihak ketiga dalam Komisi Tiga Negara yang dikenal dengan *Good Offices Committee* (GOC).

Dalam perjalanan menuju Indonesia GOC terlebih dahulu

mengadakan sidang pertama di Sidney di Australia pada tanggal 20 Oktober 1947. Dalam sidang yang pertama itu ketiga anggota GOC bersepakat bahwa mereka harus bertindak sebagai wakil Dewan Keamanan PBB dan bukan wakil dari negara pemilih mereka. Pada tanggal 27 Oktober 1947 Komisi Tiga Negara tiba di Jakarta. Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia oleh Paul Van Zeeland dan Amerika Serikat oleh Frank Graham.

Sesuai dengan hasil pertemuan di Sidney pada tanggal 20 Oktober 1947, maka tugas KTN adalah membantu menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda secara damai. Selanjutnya KTN berusaha mendekati kedua belah pihak guna menyelesaikan persoalan-persoalan militer dan politik yang dapat dipakai sebagai langkah dasar pembicaraan. Dalam hal ini KTN hanya terbatas mengajukan usul saja.

Sesudah melalui proses perundingan antara kedua belah pihak, akhirnya disepakati bahwa kedua belah pihak akan melaksanakan perundingan di atas sebuah kapal angkatan laut Amerika, *Renville*. Pada tanggal 4 November 1947 pembicaraan resmi antar anggota mulai dilakukan. Di atas kapal tersebut yang berlabuh di Jakarta pada tanggal 8 Desember 1947 GOC melanjutkan pembahasan mengenai penyelesaian politik atas konflik antara Indonesia dengan Belanda. Dalam hal ini Australia mengajukan suatu rancangan dengan usul agar kedaulatan segera diberikan kepada pemerintah Republik Indonesia dan menyediakan hak-hak protokoler bagi Belanda untuk kepentingan ekonomi dan pertahanannya.

Dalam perundingan tersebut delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir

Widjoatmodjo seorang Indonesia yang memihak Belanda. Setelah dilakukan berbagai pendekatan, perundingannya menerima saran-saran KTN sebagai berikut: (1) segera dikeluarkan perintah penghentian tembak-menembak di sepanjang garis van Mook dan (2) penghentian tembak-menembak segera diikuti dengan perjanjian peletakan senjata dan pembentukan daerah-daerah kosong militer (Mensesneg, 1986: 155).

Sementara itu pada tanggal 12 Desember 1947 Sjahrir telah tiba di Australia untuk satu kunjungan persahabatan dalam jabatannya sebagai Duta Besar Keliling Republik Indonesia. Kunjungan Sahrir tersebut dimaksudkan baik secara langsung maupun tidak langsung mencari dukungan diplomatis dari Australia dalam rangka penyelesaian masalah Indonesia dan Belanda.

Sampai dengan akhir Desember 1947, KTN belum menghasilkan sesuatu yang final. Pada tanggal 2 Januari 1948 atas desakan KTN, Belanda menyerahkan usulan yang dianggap final, akan tetapi tidak menyinggung sama sekali tentang Indonesia. Bahkan pada saat itu Belanda menyampaikan suatu ultimatum, jika sampai tanggal 11 Januari 1948 Indonesia tidak mau menerima usulan Belanda maka Belanda siap menggunakan kekerasan untuk menekan Indonesia.

Melihat situasi yang cukup panas, Graham sebagai wakil dari Amerika Serikat dalam KTN mendesak pemerintahnya agar mendesak Belanda untuk mau mematuhi ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh KTN. Tekanan Amerika ini ternyata efektif terhadap sikap Belanda untuk dapat menerima aturan-aturan dari KTN. Hal ini terbukti dengan diterimanya aturan KTN oleh Belanda pada tanggal 12 Januari 1948. Sekalipun demikian Belanda masih mengulur waktu hingga tanggal 15 Januari

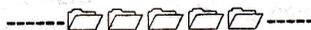
agar Indonesia mau menerima usul-usulnya. Siakap Australia yang tetap netral dalam kasus ini, dimana Australia tetap menyerahkan kepada Indonesia untuk menerima atau menolak usulan Belanda cukup membesarkan hati Indonesia (George, 1986: 147). Setelah melalui tahapan-tahapan yang menegangkan akhirnya perjanjian Renville berhasil ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Ini semua dapat terjadi tidak lepas dari peran negara Australia.

### Penutup

Untuk mengakhiri makalah ini, penulis perlu memberikan suatu kesimpulan bahwa hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Australia sudah terjadi sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Hubungan tersebut nampak nyata pada keperpihakan Australia kepada Indonesia ketika Belanda melakukan agresinya yang pertama. Karena keperpihakan Australia itu pula akhirnya konflik antara Indonesia dan Belanda dapat diakhiri dengan perundingan Renville.

### Daftar Pustaka

- George, Margaret. (1986). *Australia dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: PT. Panca Simpati.
- Kolit, DK. (1976). *Sejarah Australia dan Selandia Baru*. Ende: Nusa Indah.
- Mensesneg. (1986). *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: PT. Lamtoro Gung Persada.
- Sunardi. (1985). *Politik Luar Negeri Australia di Bawah Partai Buruh*. Jakarta: Grafindo Utama.
- Soebantardjo. (1964). *Sari Sejarah Asia-Australia*. Yogyakarta: BOPKRI
- Soemarto Djodjodihardjo dan Abdul Hamid. (1952). *U.N.O Maksud dan Tujuannya, Semangat dan Perbuatannya*. Bandung: Van Hoeve.



## PERAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA ANAK

Oleh : Endi Sudarmi<sup>5</sup>

### Pendahuluan

Alam merupakan ciptaan Tuhan dengan akal dan fikiran yang diberikan kepada manusia sehingga gejala-gejala alam dapat dipelajari oleh manusia. Tentu

saja manusia dapat mempelajari gejala-gejala alam itu dengan menggunakan akal pikiran. supaya akal dan pikiran itu dapat berkembang dan mampu melaksanakan aktivitas diperlukan konsep, yaitu konsep

<sup>5</sup> Endi Sudarmi adalah guru SD Plaosan Ranting Dinas P dan K Kecamatan Mlati, Sleman, Yogyakarta